

PENDIDIKAN POLITIK NASIONALIS-RELIGIUS: SUATU STRATEGI MEMPERKOKOH KEBHINEKATUNGGALIKAN INDONESIA

oleh:
L. Andriani Purwastuti

Abstrak

Daftar panjang berbagai kerusuhan yang bernuansa SARA, separatisme, dan konflik horizontal menjadi cacatan sejarah suram bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai saat ini. Salah satu penyebab dari masalah tersebut, selain terjadinya ketidakadilan dalam praktik kehidupan bernegara, adalah pemahaman yang kurang terhadap dasar negara Indonesia Pancasila yang berciri nasionalis-religius. Pencarian formulasi sudah dimulai sejak para bapak bangsa berusaha menetapkan dasar negara yang hendak dipakai oleh negara Indonesia yang akan merdeka.

Pemahaman yang mendalam terhadap ciri negara yang nasionalis-religius dapat dilakukan melalui pendidikan politik pada masyarakat. Pendidikan politik yang berbasis nilai nasionalis-religius disosialisasikan dan ditransformasikan baik kepada masyarakat umum maupun sekolah pada tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Penanaman nilai-nilai cinta tanah air, bela negara, persatuan, cinta kasih, perdamaian, toleransi, kepedulian, keimanan, ketaqwaan, dan kesucian menjadi tanggung jawab semua guru/dosen.

Strategi pendidikan politik yang digunakan di sekolah adalah pendekatan komprehensif, yang meliputi: perbaikan kurikulum mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan IPS dan Kewarganegaraan di tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, dan pendekatan pembelajaran yang induktif-partisipatif. Kerjasama dapat dilakukan dengan orang tua murid, ulama, dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai nasionalis-religius dalam kehidupan nyata, terutama dengan menjadi teladan bagi para peserta didik.

Kata kunci: pendidikan politik, nasionalis-religius, kebhinnekatunggalikan.

A. Pendahuluan

Berbagai fenomena disintegrasi bangsa mulai muncul bersamaan dengan adanya suksesi dari pemerintahan Orde Baru kepada pemerintahan era reformasi. Daftar panjang berbagai kerusuhan yang bernuansa SARA, sparatisme, dan konflik-konflik horizontal tertulis dengan tinta merah sebagai cacatan sejarah suram bahkan hitam bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa pemboman Hotel Marriot dan Rits pada tanggal 18 Juli 2009 merupakan peristiwa yang paling nyata yang menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa yang bhineka tunggal ika sedang terancam. Para *the founding-fathers* bangsa menyadari bahwa kondisi sosio-kultural-religius suku-suku

bangsa yang ada di Nusantara ini beraneka ragam, sehingga dengan kearifan dan refleksi filosofis mereka merumuskan dasar negara Pancasila sebagai sebuah "konsensus nasional". Semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan gambaran yang hakiki dari bangsa Indonesia. Akan tetapi pada saat ini ada sekelompok masyarakat merusak kebhinekaan tadi dengan cara memaksakan ide, gagasan sendiri atau kelompok kepada kelompok lain bahkan dengan menggunakan kekerasan fisik. Pemaksaan tadi dapat mengatasnamakan kepentingan-kepentingan politik atau agama. Jika hal ini tidak segera diantisipasi maka secara perlahan tetapi pasti NKRI akan segera menuju kehancuran dan Indonesia tinggal nama yang akan tercatat dalam buku sejarah, bahwa dahulu ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi dan keberlangsungan bangsa saat ini sedang dipertaruhkan.

Salah satu strategi yang diperlukan yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan strategi yang sangat manusiawi untuk memperkokoh kembali kebhinekatunggalikaan. Pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah penyadaran dan pemberdayaan bukan sebuah indoktrinasi atau penyeragaman terhadap sebuah ide, gagasan atau ideologi. Salah satu pendidikan yang akan dipaparkan dalam tulisan ini adalah pendidikan religius-nasionalis. Pendidikan religius-nasionalis sebagai suatu upaya penyadaran dan pemberdayaan akan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dalam implementasinya memperkuat, memperkokoh eksistensi dan keberlangsungan hidup bangsa. Pendidikan nilai-nilai keagamaan yang tidak dapat dilepaskan dengan pendidikan nilai-nilai kebangsaan. Atau dapat juga sebaliknya pendidikan nilai-nilai kebangsaan yang tidak sekuler yaitu berbasis pada nilai-nilai keagamaan.

Tulisan ini akan memaparkan tentang: pengertian dan sejarah konsep religius-nasionalis, pendidikan politik yang berbasis nilai-nilai religius-nasionalis dan kebhinekatunggalikaan, strategi integratif-komprehensif pendidikan nasionalis-religius

B. Pembahasan

1. Pengertian dan Sejarah Konsep Nasionalis-religius

Istilah religius-nasionalis tidak mudah untuk didefinisikan. Hal ini dikarenakan konsep nasionalis dengan konsep religius sering kali dipertentangkan khususnya dalam sejarah perjuangan bangsa dan dinamika politik yang terjadi di era reformasi ini. Gagasan tentang nasionalis-religius ini telah muncul di Indonesia

pada waktu dipilihnya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden NKRI yang pertama. Mereka dianggap sebagai representasi nasionalis-religius. Demikian pula jika dilihat bagaimana penentuan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Yusuf Kalla, Megawati – Muzadi, Amin Rais – Siswono, kesemuanya tadi menggambarkan bagaimana kedua konsep yang seringkali dipertentangkan tersebut, akan disintesis. Jargon religius-nasionalis sesungguhnya lemah secara metodologis dan karena itu sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan secara intelektual karena keluar dari landasan fakta historik. Dialektika antara religius-nasionalis sangat berkaitan dengan dialektika Islam dan nasionalisme pada masa menjelang dan awal kemerdekaan. Istilah religius kemudian dimunculkan sebagai pengganti Islam, karena keduanya dipandang identik (Mohammad Nasih).

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa pertentangan antara nasionalisme dan Islam tampak ketika Panitia Delapan mengidentifikasi terdapat pertentangan dua kelompok besar dari hasil sidang BUPKI tentang calon dasar negara. Kelompok Islam menghendaki negara berdasar atas agama Islam yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo, KH Abdul Kahar Muzakir (Muhammadiyah) dan KH Wahid Hasyim (NU), dan kelompok nasionalis yang menghendaki calon dasar negara bukan agama Islam, tetapi berdasar atas paham negara – kebangsaan (*nation-state*) yang diwakili oleh Soekarno dkk. Pertentangan ini memperoleh akar yang kuat dari sejarah dari negara kebangsaan yang muncul di Eropa. Paham kebangsaan yang muncul di Eropa bersamaan dengan Renaissance yang diidentikkan dengan sekulerisme yang memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia (negara). Agama mengurus hubungan antara individu (pribadi) dengan Tuhan, sedangkan negara mengurus hubungan antara manusia dengan manusia. Oleh karena itu negara kebangsaan dipandang oleh kelompok Islam pada saat itu sebagai sekuler, dan ditolak karena tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang religius. Pandangan kelompok ini disanggah oleh Soekarno. Soekarno berpendapat bahwa negara bangsa Indonesia tidak akan mengerdilkan agama. Agama akan dimerdekakan oleh agama, dan sebaliknya memerdekakan negara dari agama. Negara nasional Indonesia yang akan merdeka nantinya menjamin warga negaranya untuk memeluk agama tertentu karena negara memberi kebebasan kepada warganya beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

Sesungguhnya paham nasional tidak bertentangan dengan agama. Kesalahpahaman mengenai paham nasional dalam hal ini karena seseorang yang berpaham nasional dianggap pasti anti agama, padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Alasan yang mendasari konsep negara-bangsa dari sudut pandang agama adalah tidak adanya teks al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad, maupun ijma' ulama yang memerintahkan untuk mendirikan negara-Islam (Mohammad Nasir).

Akan tetapi pertentangan kedua kelompok ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan disepakatinya rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta, sehingga Piagam Jakarta dipahami sebagai konsensus Nasional. Sebagai konsensus antara kelompok Islam dan Nasionalis, yaitu dengan dicantumkan sila pertama dengan rumusan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Akan tetapi sejarah telah mengubah sila pertama ini dengan Ketuhanan Yang Maha Esa pada tanggal 18 Agustus 1945 demi keutuhan dan kesatuan NKRI yang baru saja merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kesimpulan dari uraian di atas adalah walaupun dalam masa menjelang dan awal kemerdekaan terjadi pertentangan antara Islam dan Nasionalisme, tetapi sesungguhnya para bapak bangsa telah sepakat bahwa dalam konteks negara bangsa Indonesia kedua konsep ini tidak dipertentangkan bahkan menjadi suatu perpaduan yang harmonis, kedua konsep saling berkaitan yang tampak dalam kesepakatan nasional tentang Pancasila yang dengan tegas mencamtumkan sila Ketuhananan Yang Maha Esa, yang tentunya asas atau prinsip ini tidak terdapat dalam paham kebangsaan yang ada di Barat yang memang mengambil konstruksi negara yang sekuler.

Berdasarkan kesepakatan nasional Pancasila dirumuskan untuk dasar negara, dengan demikian segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang mempunyai sifat religius-nasionalis. Implikasi logis ini seharusnya tampak secara khusus dalam bidang politik. Bidang politik merupakan aspek utama dalam merealisasikan nation-state yang berciri religius-nasionalis. Politik Indonesia diharapkan menjadi sebuah politik yang tetap diwarnai nilai-nilai spiriual-keagamaan, politik yang tidak sepenuhnya terlepas dari koridor moral dan nilai-nilai ketuhanan yang menjadi landasan dan dasar ideologi negara. Upaya ini hendaknya tidak dilihat sebagai "pemolitikan

agama”, yaitu isu-isu agama sebagai komoditas politik untuk memperoleh kekuasaan dan semacamnya, tetapi lebih pada “pengagamaan politik”, yaitu upaya menjadikan agama sebagai “pengawas” para pelaku politik agar tidak terjebak dalam politik *machiavelianisme* yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya (Rusiani)

2. Pendidikan Politik yang berbasis Nilai-Nilai Nasionalis-Religius dan Kebhinekatunggalikaan

Untuk mewujudkan praksis politik yang tidak melepaskan dari nilai-nilai nasionalis (kebangsaan) dan keagamaan diperlukan sebuah penyadaran dari seluruh elemen masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pendidikan politik kepada masyarakat baik langsung ataupun tidak langsung, melalui berbagai jalur baik formal, informal, maupun non-formal.

Pendidikan dapat dipahami minimal dalam empat macam pengertian: 1) berbagai macam bentuk kegiatan (khususnya pembelajaran); 2) proses atau pengalaman pembelajaran; 3) buah atau produk yang dihasilkan dalam diri peserta didik oleh proses dan aktivitas pembelajaran yang melibatkan dirinya; 4) ilmu yang menyelidiki ketiga hal tersebut. Keempat pengertian tadi dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan antara pengertian satu dengan lainnya (Sudarminto, 1994: 8).

Walaupun terdapat banyak pengertian tentang pendidikan tetapi terdapat unsur-unsur esensial yang tercakup dalam pengertian pendidikan, yaitu:

- a. Pendidikan mengandung pembinaan kepribadian, pengembangan potensi-potensi peserta didik, dan peningkatan dan tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan
- b. Ada interrelasi antara pendidik dan peserta didik. Walaupun masing-masing pihak memiliki peran yang berbeda tetapi keduanya terjalin suatu kerja sama dalam proses transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan ketrampilan yang diarahkan pada tujuan tertentu yang diinginkan.
- c. Pendidikan adalah proses sepanjang hayat dari perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam arti pengembangan segenap potensi dalam rangka pemenuhan semua komitmen manusia sebagai individu, sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk Tuhan

d. Aktivitas pendidikan dapat berlangsung dalam keluarga, dalam sekolah, dan dalam masyarakat (Dirto Hadisusanto, 1995: 7).

Sedangkan T. Yacob (2007: 5) mengatakan walaupun praksis pendidikan harus mengikuti perkembangan jaman, tetapi pendidikan yang baik tetap meliputi:

- a. Humanisasi dan humaniorasasi yang bersifat global
- b. Enkulturasasi yang bersifat nasional
- c. Perjuangan hidup, survival, mempertahankan existensi.

Humanisasi penting karena sebagian kita masih pada tingkat peradaban yang rendah, yang dapat dilihat dalam sikap perikemanusiaan. Dampak negatif perkembangan Iptek dan lingkungan nasional, mondial, dan global dapat menimbulkan dehumanisasi. Tugas berat pendidikan saat ini adalah berusaha agar manusia makin sempurna, lebih baik daripada manusia kemarin. Pada tingkat nasional pendidikan harus mendidik generasi muda untuk menjadi pendukung kebudayaan Pancasila, agar tetap lestari dan kohesi bangsa terpelihara. Selain itu pendidikan mengajar seseorang untuk bertahan hidup dalam perjuangan untuk eksistensi, mencari makan dan penghidupan.

Mengacu pada essensi pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, maka tidak terkecuali dengan pendidikan politik yang ada di Indonesia. Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui berbagai aktivitas mulai dari bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa mendatang dalam bidang politik. JJ. Patrick (Mutrofin, 1997) menjelaskan bahwa:

Ada empat dimensi arah pendidikan politik yang seyogyanya dilakukan di sekolah (perguruan tinggi). Pertama, pengetahuan tentang politik. Pengetahuan tentang politik mengacu pada konsep, informasi dan pertimbangan faktual tentang sistem pemerintahan dan politik. Kedua, keterampilan intelektual terkait kemampuan menjelaskan, menggambarkan, dan menginterpretasikan atau menilai fenomena politik. Ketiga, keterampilan partisipasi politik, artinya memaksimalkan interaksi dengan orang lain, memelihara sikap kebersamaan dalam kelompok, bekerja sama dengan orang lain. Keempat, sikap politik, artinya membuat peserta didik mampu memilih secara tepat berbagai kepentingan politik yang ditawarkan kepadanya, penghargaan terhadap perbedaan visi, percaya kepada pemerintah dan semangat patriotisme.

Pendidikan politik itulah yang akan menyiapkan anak bangsa untuk menggeluti persoalan sosial dalam medan kehidupan dalam bentuk atensi dan partisipasi, menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung-jawab dan memberi mereka kesempatan yang mungkin mereka bisa menunaikan hak dan kewajibannya. Untuk terwujudnya hal ini diperlukan pemahaman yang benar terhadap ideologi politik yang dianutnya. Artinya, suatu pendidikan politik yang mentransfer nilai-nilai dan dieologi politik dari generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan politik merupakan kebutuhan darurat bagi masyarakat, karena berbagai faktor yang saling mempengaruhi, dengan demikian pendidikan politiklah yang dapat membentuk kesadaran sebagai warga negara yang baik, membangun individu dengan kepribadian yang mantap, kemudian mengkristalkan nilai-nilai tersebut, sehingga menjadi nasionalisme sejati (Ramdansyah, <http://www.JaktimBeritajakarta.com>)

Pendidikan politik yang membangun nasionalisme tersebut adalah berkait dengan nilai-nilai nasionalis-religius sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Religius dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat yang terkait nilai-nilai keagamaan yang tersangkut paut dengan religi. Religi berarti kepercayaan kepada Tuhan; kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia. Tetapi di pihak lain, pengertian religius itu terkait dengan nilai-nilai moral dalam agama. Kebaikan, sopan-santun, ketaatan pada ajaran Tuhan (Agus rakasiwi: kampus_pr@yahoo.com),

Dengan demikian nasionalisme yang dicita-citakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terwujudnya suatu masyarakat religius, yaitu masyarakat yang tidak lepas dari nilai-nilai moral dalam agama. Sebuah tatanan masyarakat yang tidak sekuler yang memisahkan dengan tegas hubungan antara agama dengan negara. Cita-cita negara proklamasi 17 Agustus 1945 adalah terwujudnya negara nasionalis yang demokratis tetapi yang dijiwai dengan nilai-nilai agama. Oleh karena negara Pancasila juga bukan pula negara agama, maka berbagai agama dapat hidup secara berdampingan di Indonesia. Dr. Muhammad Muhajir dalam seminar di Timur Tengah pada tanggal 26 Agustus 2005 yang membedah dan menguraikan persoalan seputar Masyarakat Religius dalam kaitanya dengan Nasionalisme, Demokrasi dan Globalisasi mengatakan bahwa secara historis rakyat Indonesia

memiliki tanggung-jawab moral bersama, sebagai bagian dari bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat religius, yakni masyarakat yang berperadaban dan dijiwai oleh nilai-nilai etis keagamaan. Menurutnya, “terbangunnya Masyarakat Religius adalah cita-cita ideal dari falsafah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila yang berdasarkan sila pertamanya, Ketuhanan Yang Maha Esa. “Berkaca dari sejarah, lanjutnya: “cita ideal Masyarakat Religius pada hakikatnya sejalan dengan misi profetik yang diemban Nabi Muhammad di muka bumi, untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia dan menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia (Rahmatan lil ‘alamin). Dalam konteks keindonesiaan, model otentik bangunan masyarakat di Madinah dapat dijadikan refleksi untuk pembangunan masyarakat religius di tanah air (media center Semilok BKPPI LV).

Pendidikan Politik dapat diartikan secara longgar dan sempit. Pendidikan politik diartikan sosialisasi politik.. Pendidikan politik dalam arti longgar merupakan bagian e dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Pendidikan politik dalam arti ketat diartikan usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik, kahingga mereka memahami dan menghayati bdikandung betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sitem politik ideal yang hendak dibangun. (Alfian, 1986: 245).

Sistem politik ideal yang akan dibangun oleh negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila berisi nilai-nilai ideal yang hendak diwujudkan dalam sistem politik Indonesia.

Nurcholish Madjid, dalam bukunya yang berjudul: *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi* (1999: 72) mengatakan bahwa:

Membandingkan Pancasila/UUD 45 di Indonesia dengan Konstitusi Madinah tidak hanya mengisyaratkan kesejajaran pola penerimaan kelompok bersangkutan akan nilai-nilai kesepakatan itu. Tetapi juga mengimplikasikan adanya hak dan kewajiban yang sama pada kelompok-kelompok bersangkutan yang bisa disejajarkan. Terhadap Konstitusi Madinah, Rasulullah s.a.w dan umat Islam di bawah pimpinan beliau berkewajiban membela keutuhan dan perincian pelaksanaannya dari setiap penyelewengan dan penghianatan..., maka sebanding dengan apa yang telah diperbuat oleh kaum Muslim Madinah

terhadap konstitusi mereka itu, umat Islam Indonesia berkewajiban pula mempertahankan nilai kesepakatan itu dari setiap bentuk pengkhianatan.

Dari pendapat Nurcholish Madjid dapat disimpulkan bahwa ada kesejajaran antara Pancasila (sebagai Konsensus Nasional antara kelompok Islam dan Nasionalis) dengan Piagam Madinah. Oleh karena itu tentunya tidak perlu ada kekhawatiran dari semua pihak bahwa masyarakat madinah sebagai cita-cita politik di era reformasi akan membawa Indonesia menjadi negara yang dilandasi oleh nilai-nilai religius.. Justru dalam pelaksanaannya masyarakat madinah yang didambakan adalah masyarakat yang penuh dengan kebebasan beragama, penghormatan, toleransi, kerja sama antar pemeluk agama yang berbeda dan tumbuhnya musyawarah mufakat sebagai wujud sebuah kesepakatan antar mereka yang berbeda. Cita-cita ini sungguh merupakan sesuatu yang mulia. Akan tetapi dalam praksis kehidupan di Indonesia tampaknya cita-cita ini masih jauh dari kenyataan. Saling curiga, ketidakpercayaan antar kelompok dan keinginan untuk membangun kelompok-kelompok eksklusif justru yang ada dalam masyarakat Indonesia di era reformasi ini.

Nilai-nilai spiritualitas yang penting untuk dikembangkan antara lain: kejujuran, keadilan, kebajikan, kesetiakawanan sosial dll. Pendidikan agama yang selama ini dilaksanakan di sekolah lebih berfokus pada formalisme berlebihan yang justru dapat mempersempit ruang gerak agama. Agama hanya dipahami sebatas pada seperangkat aturan-aturan (syariat) yang baku dan harus ditaati dengan mutlak oleh pemeluknya. Pemahaman dan penghayatan agama pada aspek formalisme berlebihan akan melahirkan keberagamaan yang eksklusivisme. Eksklusivisme yaitu sikap menutup diri dari pergaulan dengan orang lain, dan juga karena takut tercemar keburukan orang lain, dan juga karena ingin mempertahankan keaslian dan kemurnian pribadi (Mangunwijaya, 1999: 43).

Dalam konteks Indonesia eksklusivisme agama tidak dibenarkan karena Negara Indonesia merupakan negara yang plural-multikultural dalam agama. Oleh karena itu sikap inklusif seharusnya dimiliki oleh semua pemeluk agama. Untuk mengembangkan sikap inklusivisme beragama perlu dilakukan reorientasi pendidikan agama. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:

1. memberikan fokus atau titik perhatian dari agama ke religiusitas, artinya lebih dipentingkan aspek penghayatan dan aktualisasi terhadap substansi nilai-nilai luhur keagamaan
2. kemajemukan agama dimasukkan dalam materi pembelajaran . Kemajemukan selain sebagai realitas kosmik yang tak terbantahkan. Hal penting dikembangkan yaitu sikap kesamaan dan saling mengerti, bukan sekedar berdampingan secara damai
3. menekankan pada pembentukan sikap. Pendidikan agama yang berlangsung selama ini memang cenderung diisi dengan materi agama secara eksplisit-tekstual dengan metode pembelajaran ceramah dengan pendekatan deduktif-normatif bukan pendekatan induktif-partisipatif (Ngainun Naim, 2008: 179-181).

Oleh karena itu pendidikan politik yang berbasis pada pada nilai-nilai religius dan nasionalis seharusnya diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan formal. Setiap jenjang pendidikan dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai dengan pendidikan tinggi wajib mengintegrasikan nilai-nilai universalitas agama-agama dan nilai-nilai kebangsaan misalnya: keimanan, ketaqwaan, kesucian, kebenaran, keadilan, kesejahteraan, musyawarah, penghormatan terhadap kemartabatan manusia, cinta terhadap bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, kebanggaan terhadap bangsa dimana mereka hidup, kejuangan untuk membangun kejayaan bangsa. Nilai-nilai ini dapat disisipkan dalam semua proses pembelajaran utamanya untuk mata pelajaran agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada hakikatnya nilai-nilai tersebut dapat disisipkan dalam semua mata pelajaran baik yang bersifat scientis maupun yang sosial. Seorang guru dapat menyisipkan nilai-nilai tersebut dalam pokok-pokok bahasan yang relevan. Untuk guru-guru agama tidak hanya mengajarkan pengetahuan yang bersifat theologis dogmatis yang lepas dari nilai-nilai kebangsaan. Demikian sebaliknya guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warganegara, cinta tanah air, bela negara dan hal lain yang berkaitan dengan kehidupan manusia di negara (di dunia ini) saja tanpa dikaitkan dengan nilai-nilai

religius sebagaimana diajarkan dalam kewarganegaraan di negara-negara yang berpaham sekuler.

Sedangkan di perguruan tinggi nilai-nilai ini menjadi fokus dalam mata kuliah pendidikan kepribadian (Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan). Mencermati khusus untuk pendidikan Pancasila selain sebagai pendidikan kepribadian juga sebagai pendidikan politik di PT, maka pada saat ini beberapa Perguruan Tinggi menggabungkan Pendidikan Pancasila dengan Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana amanat UU No. 20 Tahun 2003. Kebijakan yang diambil oleh beberapa Perguruan Tinggi ini tentunya sangat memprihatinkan, karena pendidikan politik yang religius-nasionalis yang diselenggarakan oleh PT tidak bisa lepas dari Pancasila sebagai dasar negara. Pendidikan politik yang religius nasionalis pada hakikatnya adalah pendidikan yang berbasis utamanya tentang sila pertama dan ketiga, walaupun dipahami bersama antara sila-sila Pancasila tidak dapat dipisahkan, saling mendasari dan menjiwai. Dengan kebijakan tersebut porsi waktu dan fokus pendidikan tentang nilai/sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Persatuan Indonesia menjadi berkurang. Bagaimana mungkin hal yang sangat urgen bagi kelangsungan hidup bangsa tidak dapat maksimal disampaikan kepada peserta didik.

Pendidikan politik secara luas dapat disosialisasikan dan ditransformasikan melalui semua bentuk penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara, baik dalam bentuk sistem maupun praksis. Sistem pemerintahan, sistem politik, sistem hukum, sistem sosial, sistem pendidikan, sistem Hankam hendaknya menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang religius (theis) dan bukan negara sekuler. Sedangkan dalam praksis, seluruh praktik penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara mengacu pada nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kesholehan, kesucian, kebenaran, keadilan, humanis, toleransi, kebersamaan, cinta bangsa dan negara, dll., sehingga negara bangsa Indonesia yang secara alamiah dan historis adalah bhineka dalam segala aspek tetap menjadi tunggal ika. Bersatu dalam keanekaragaman dapat menjadi cara hidup seluruh masyarakat. Oleh karena itu segala bentuk penyeragaman harus dihindarkan.

3. Strategi Pendidikan Politik Nasionalis Religius dalam Pendidikan Formal

Pelaksanaan Pendidikan politik Nasionalis Religius dalam Pendidikan Formal perlu strategi yang tepat. Strategi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Nilai-nilai nasionalis atau kebangsaan (cinta tanah air, bela negara, persatuan, keadilan, kebanggaan terhadap bangsa dan negara) dan nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas, seperti: keimanan, ketaqwaan, kesucian, kebenaran hakiki, toleransi, perdamaian, keadilan, cinta-kasih, dll) terintegrasi pada semua mata pelajaran/mata kuliah. Pendidikan nasionalis-religius menjadi tanggung-jawab semua guru/dosen mata pelajaran/mata kuliah. yang ada pada setiap jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak sampai perguruan tinggi.
- b. *Reorientasi* terhadap pendidikan agama. Pendidikan agama selama ini ditengarai baru mengembangkan aspek kognitif (pengetahuan), sehingga belum menyentuh aspek afektif (sikap) dan perilaku, Pendidikan agama yang terjadi pada saat ini belum menghasilkan insan yang religius yang memiliki sikap inklusif.
- c. Review kurikulum untuk pendidikan kewarganegaraan, IPS dan Pendidikan agama di jenjang pendidikan dasar dan menengah dan Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi (Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan), bahasa Indonesia, Matakuliah Berkehidupan Bersama (MBB: Ilmu Alamiah Dasar dan Ilmu Sosial-Budaya Dasar) dengan memasukkan materi-materi kemajemukan suku, bahasa, budaya dan agama, sehingga semakin disadari oleh peserta didik bahwa negara Indonesia merupakan negara yang bhineka tunggal ika.
- d. Pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan induktif-partisipatif. Peserta didik belajar langsung pada kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, misalnya mereka diberi tugas untuk mengamati, menganalisis, melaporkan dan mendiskusikan berbagai kesenian-budaya dan ritual-ritual berbagai agama yang ada di daerahnya masing-masing. Untuk peserta didik yang sudah dewasa dapat dilakukan dengan kegiatan "live-in" hidup bersama dalam keluarga atau masyarakat yang berbeda suku, budaya dan agama dengan dirinya. Mereka melakukan proses analisis-sintesis, evaluasi dan refleksi terhadap pengalamannya. Metode *contextual learning* ini lebih efektif bagi peserta didik daripada guru hanya menggunakan metode ceramah. Metode *problem solving*

dapat digunakan untuk melibatkan peserta didik dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup berbangsa dan beragama yang pada saat ini riil dihadapi oleh bangsa Indonesia ini.

Selain berbagai strategi umum yang dikemukakan di atas, terdapat strategi pendidikan nilai-nilai nasionalis-religius yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu:

- a. Aktivitas guru sebagai model atau teladan. Seluruh aktivitas guru dan kepribadian guru baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah menjadi contoh. Guru seharusnya memperlakukan siswanya dengan toleran, tidak diskriminatif, menghargai perbedaan. Guru adalah pribadi yang toleran, mencintai peserta didik dengan tulus, menghargai dan memiliki sikap inklusif;
- b. Menciptakan suatu masyarakat nasionalis-religius di dalam kelas, membantu para siswa untuk saling mengenal satu sama lain yang secara kodrati maupun sosial-budaya dan agama beraneka-ragam.
- c. Mempraktekan aturan-aturan sebagai kesempatan untuk memacu pemikiran tentang kebersamaan, keadilan, penghormatan kepada orang lain yang berbeda dengan dirinya
- d. Ciptakan lingkungan kelas yang demokratis, libatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan dan berikan tanggung-jawab untuk membuat kelas sebagai tempat kondusif bagi munculnya aktualisasi nilai-nilai nasionalis-religius
- e. Ciptakan budaya moral positif di sekolah, kembangkan seluruh lingkungan sekolah (melalui kepemimpinan kepada sekolah), memperluas disiplin sekolah, memperluas rasa kemasyarakatan di sekolah, ciptakan organisasi siswa yang demokratis, ciptakan suasana nasionalisme dan religiusitas dan sediakan waktu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme-religius.
- f. Ajaklah orang dan anggota masyarakat di sekitar sekolah sebagai partner dalam pendidikan nilai-nilai nasionalis-religius, dukung orang tua sebagai pendidik moral pertama dan utama bagi anak-anaknya, doronglah orang tua untuk mendukung sekolah dalam usaha-usaha untuk memacu meningkatkan nilai-nilai tersebut, dan gunakan bantuan nilai-nilai nasional-religius yang akan diajarkan di sekolah (I Wayan Koyan, 2000: 91-93).

Keberhasilan pendidikan nasionalis-religius tidak hanya ditentukan oleh sekolah tetapi semua komponen (pemerintah, orang tua dan masyarakat). Pendekatan komprehensif harus dilakukan sehingga dengan cepat dan tepat dapat dipakai sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan yang ada, serta dapat memperbaiki kondisi yang terlanjur porak poranda yang diakibatkan terjadinya berbagai konflik yang bernuansa SARA. Konflik inilah yang mencenderai kodrat bangsa Indonesia yang bhineka tunggal ika.

C. Penutup

Konsep nasionalisme-religius di Indonesia memiliki sejarah cukup panjang sejak bangsa Indonesia membicarakan dasar negara pada masa persiapan kemerdekaan sampai era reformasi. Disahkannya UUD 1945 yang di dalamnya tercantum dasar negara Indonesia Pancasila, dengan menempatkan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara nasional yang religius.

Dasar Pancasila menjadi fundamen dan basis bagi semua sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk salah satunya adalah sistem pendidikan nasional. Pendidikan politik yang berbasis nilai-nilai keimanan, ketakwaan, kesholehan, kesucian, kebenaran, keadilan, humanis, toleransi, kebersamaan, cinta bangsa dan negara disosialisasikan dan ditransformasikan melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal, sehingga negara bangsa Indonesia yang secara alamiah dan historis adalah bhineka dalam segala aspek tetap menjadi tunggal ika.

Pelaksanaan pendidikan politik berbasis pada nilai-nilai nasionalis-religius di dalam pendidikan formal dapat diintegrasikan pada semua mata kuliah utamanya pada mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, IPS pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, sedangkan di Perguruan Tinggi melalui mata kuliah pengembangan kepribadian (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan), Bahasa Indonesia, mata kuliah berkehidupan bersama (Ilmu Alamiah Dasar, dan Ilmu Sosial-Budaya Dasar).

Pendidikan nasionalis-religius menjadi tanggung-jawab semua guru/dosen mata pelajaran/mata kuliah yang ada pada setiap jenjang pendidikan. Reorientasi terhadap pendidikan agama yang kognitif-teologis-dogmatis kepada pendidikan

agama yang menekankan pada sikap dan perilaku, memasukkan materi-materi kemajemukan suku, bahasa, budaya dan agama, sehingga semakin disadari oleh peserta didik bahwa negara Indonesia merupakan negara yang bhineka tunggal ika. Pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan induktif-partisipatif, penggunaan metode *contextual learning*, *problem solving* dalam pembelajaran. Pendekatan komprehensif harus dilakukan sehingga dengan cepat dan tepat dapat dipakai sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan yang ada, serta dapat memperbaiki kondisi yang terlanjur porak poranda yang diakibatkan terjadinya berbagai konflik yang bernuansa SARA. Konflik inilah yang mencenderai kodrat bangsa Indonesia yang bhineka tunggal ika.

D. Daftar Pustaka

- Alfian. 1986. *Pembangunan Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Depdiknas. 2003. *UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Dirto Hadisusanto. 1995. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: FIP UNY
- I Wayan Koyan. 2000. *Pendidikan Moral - Pendekatan Lintas Budaya*. Jakarta: Dikti. Proyek Pengembangan Guru Sekolah Menengah IBRD Loan. 3979
- Mangunwijaya. 1999. *Menjadi Generasi Pasca Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mohammad Nasih. 2010. *Menyoal Jargon Nasionalis-Religius*. Diambil pada tanggal 15 Agustus 2010 dari <http://gmnr.wordpress.com/>.
- Ngainun Naim & Achmad. Sauqi. 2008. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Ar-Ruzz
- Nurcholish Madjid. 1999. *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina
- Yacob, T. 2007. *Teknologi dan Kebudayaan*. Jakarta: PT Gramedia.